

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
HERI HASAN HARIRI
NIM. E01112048

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : hasanheri6@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fenomena ini diindikasikan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kabupaten Sambas khususnya bagi peserta non PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri di Kecamatan Sejangkung dinilai masih kurang optimal, sehingga banyak masyarakat tidak mendaftar di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diantaranya, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mengenai program JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas..

Hasil dari penelitian ini ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi JKN yaitu Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan hanya di satu tempat yaitu kantor camat Sejangkung, dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Variabel sumber daya yang mempengaruhi program ini kurang memadai, terutama sumber daya tenaga dan keuangan. Disposisi merupakan karakter ataupun watak yang dimiliki oleh implementor yaitu BPJS Kabupaten Sambas. BPJS Kabupaten Sambas dalam pembagian tugas telah sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedure*). Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Program Jaminan Sosial, Sosialisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Abstract

The aim of this research is to find out about the implementation of National Health Insurance programs (JKN) by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS) in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. The problem is that there are many people who have not been registered for the National Health Insurance program (JKN). This phenomenon indicated that the socialization conducted by the BPJS in Sambas Regency especially for non-PBI (aid Recipient) or independent participants in Sejangkung Subdistrict is still considered less optimal, so many people have not registered through the BPJS. The theory used in this research is the theory by Edward III namely factors affect the implementation. This study aims to identify and analyze the factors that affected the implementation such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure of the JKN program by the BPJS in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency.

The results of this research showed that there were four factors that affected the implementation of JKN namely socialization of JKN program conducted by the Healthcare and Social Security Agency (BPJS) which was still ineffective because it was conducted only in one place, namely Sejangkung Subdistrict Office, and involved only a small part of the community. The variable of resources that affected this program were inadequate,

especially energy and financial resources. Disposition is the character of the administrator of BPJS in Sambas Regency. The division of tasks in BPJS of Sambas Regency was in accordance with the SOP (Standard Operational Procedure). The suggestion from this research is that there is a need to evaluate the implementation of National Health Insurance Program in Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency.

Keyword : Implementation, Social Security Program, Socialization, Healthcare and Social Security Agency.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewajiban untuk menerapkan suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu juga, pemerintah mempunyai kewajiban sebagai amanat amandemen UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang merupakan bagian integral dari BPJS. Sebagai kebijakan yang relatif masih baru yang diresmikan pada 1 Januari 2014 yang lalu, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia baik di seluruh kota maupun di pelosok desa, namun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diduga masih kurang optimal sesuai dengan target

yang hendak dicapai. Misalnya di Kecamatan Sejangkung yang berjalan belum efektif.

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya non PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 5.871 jiwa dan Non PBI berjumlah 2.686 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan data BPJS di Kabupaten Sambas tahun 2016.

Badan penyelenggara jaminan sosial atau dikenal dengan BPJS memiliki tujuan yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga negara Indonesia agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, maka diselenggarakanlah berbagai usaha atau strategi program kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Peserta yang telah terdaftar di BPJS mesti mengetahui informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan misalnya pelayanan dari tenaga medis yang tidak menyenangkan, malpraktik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sosialisasi sangat penting dalam hal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya non PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia, namun seiring berjalannya program ini ada beberapa fenomena yang ditemui di lapangan, mulai dari keluhan pasien yang ingin berobat namun harus melalui berbagai prosedur yang berbelit-belit khususnya pasien yang belum mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang perlu penanganan segera seperti pasien UGD (Unit Gawad Darurat) dan bagi pasien yang ingin berobat tapi harus menunggu waktu 14 hari baru berlaku membuat pasien lebih memilih pelayan umum.

Berdasarkan atas observasi peneliti mengenai implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non PBI

(Penerima Bantuan Iuran) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas masih ditemukan beberapa kendala, mulai dari kurang optimalnya sosialisasi pihak BPJS kepada masyarakat sehingga terdapat keterbatasan pemahaman mengenai program ini.

Hal lain yang memberatkan masyarakat untuk menjadi peserta program JKN yaitu adanya kewajiban bagi setiap anggota keluarga meskipun yang sakit hanya salah satu dari anggota tersebut, terdapat biaya perbulannya yang harus dikeluarkan secara rutin. Adapun tujuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk menjamin kesehatan nasional dan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam sosialisasi, tenaga ahli serta pemahaman masyarakat tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengenai partisipasi masyarakat dan tentunya permasalahan biaya. Dalam hal ini BPJS sebagai penyelenggara berperan sangat penting dan berpengaruh terutama dalam hal upaya menciptakan iklim yang mendorong masyarakat terciptanya prakarsa dan swadaya masyarakat melalui penyampaian informasi.

Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali lebih mendalam mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan implementasinya di Kecamatan Sejangkung. Untuk itulah, peneliti mengambil judul “ Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penilaian mengenai komunikasi dan sumber daya dalam pengimplementasian program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak semudah proses perumusan kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat tergantung dari

implementor bagaimana cara memahami konsep yang akan diterapkan.

Carl Friedrich (dalam Winarno, 2002: 15) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Adapun menurut Mustopa Didjaja AR. (2003 : 5) “Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang didasarkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan.

James Anderson (dalam Agustino 2006: 7), memberikan pengertian kebijakan publik, “ Sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Smith (Tachjan 197: 37). Unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus ada ialah :

1. Unsur Pelaksana
2. Adanya program yang akan dilaksanakan
3. Target group

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintah. Smith Quade menyebutkan dengan istilah *“implementing organization”*, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Program

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksanaan. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kebijakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

3. Target group

Target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat

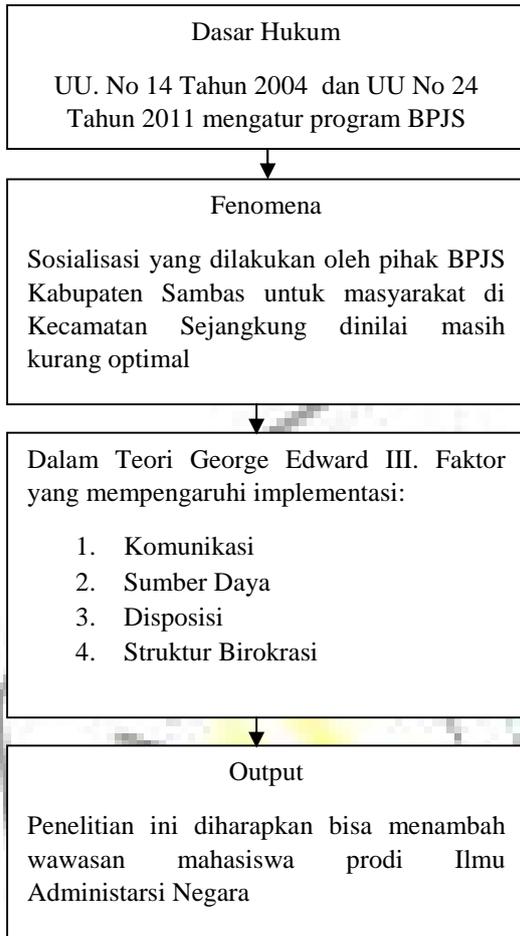
yang akan menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, mereka diterapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Model yang digunakan sebagai penelitian ini adalah model Edward III (dalam Iswono,1996) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah atau birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan.
2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai.
3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program atau aparat pemerintah atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, dimana harus mewisadahi proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan (Iswono, 1996)

Gambar 01.

Bagan kerangka pikir



mendapatkan hasil secara faktual dan akurat. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra lapangan)

Peneliti mengumpulkan dan mencari informasi dan observasi sementara untuk mencari informasi melalui orang terdekat pengguna BPJS dan juga informasi di Internet.

2. Turun ke Lapangan

Peneliti turun ke lapangan (tempat penelitian) yang dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non PBI.

3. Melakukan wawancara pra penelitian.

Peneliti melakukan wawancara pra penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kabupaten Sambas, Kepala Puskesmas Sejangkung dan Peserta

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penyelesaian masalah dengan menggambarkan fakta yang ada dilapangan mengenai implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Adapun tempat penelitian yang diteliti penulis adalah di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Adapun subjek yang dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS kabupaten Sambas
2. Kepala Puskesmas Kecamatan Sejangkung
3. Peserta BPJS Non PBI (Mandiri).

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini adalah berupa sosialisasi, komunikasi antara pelaksana atau implementor sangat mempengaruhi keberhasilan sosialisasi dalam proses pengimplementasian program JKN non PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau mandiri melalui BPJS. Menurut Winarno (2002: 74) mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi ke organisasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPJS Kabupaten Sambas dan Kepala Puskesmas Sejangkung bahwa BPJS sebagai implementor telah mensosialisasikan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dibantu pihak puskesmas Sejangkung, dengan mengundang masing-masing perangkat desa di kecamatan Sejangkung, kader posyandu beberapa tokoh berpengaruh seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum, ibu PKK, ibu rumah tangga dan lain-lain, namun setelah disosialisasikan progam JKN ini masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program ini, karena yang ikut dalam sosialisasi ini hanya sebagian kecil dari masyarakat di Kecamatan Sejangkung. Adapun juga sosialisasi tidak dilakukan ke tiap-tiap desa, kecuali jika diperlukan. Hal ini juga yang mengakibatkan sosialisasi program

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kurang optimal, karena belum tentu masyarakat yang ikut sosialisasi menyampaikan ke masyarakat lainnya.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Seperti perangkat desa, puskesmas sejangkung, ibu PKK, Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain yang merupakan perpanjangan tangan BPJS dalam mengimplementasikan Program JKN di Kecamatan Sejangkung.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi Program JKN.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh (Edward dalam Widodo 2006 : 100).

Sumber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terlibat di dalamnya, mutu dan jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan budaya organisasi. Selain itu apabila suatu

kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi maka sumber daya organisasi juga meliputi kerjasama dan koordinasi. Hal tersebut yang telah dilakukan BPJS Kabupaten Sambas dalam mensosialisasikan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kecamatan Sejangkung, yang melibatkan puskesmas, perangkat desa serta tokoh penting yang merupakan salah satu koordinasi pengimplementasian Program JKN.

Tahapan dari implementasi suatu kebijakan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan dan disiplin ilmunya, agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan suatu organisasi semakin efektif. Setelah pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan masyarakat sebagai *target group*. BPJS Kabupaten Sambas berharap masyarakat yang mengikuti sosialisasi program JKN baik PBI maupun non PBI bisa menyampaikan informasi yang diperoleh kepada masyarakat lainnya agar masyarakat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya untuk menjadi peserta JKN.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakter ataupun watak yang dimiliki oleh implementor yaitu BPJS Kabupaten Sambas. Menurut George C Edward III (dalam Subarsono, 2006: 91) mengatakan bahwa disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Watak yang dimaksud adalah seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis implementor dalam menjalankan program.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkahlaku-tingkahlaku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat Kabupaten Sambas memiliki sikap kondusif terhadap kebijakan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS ini,

sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak *fleksibel*.

Struktur organisasi di BPJS Kabupaten Sambas yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara pemerintah pusat dan BPJS Kabupaten Sambas dalam pembagian tugas harus sesuai dengan prosedur, dengan demikian akan terjalin hubungan antar implementor, dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para implementor dalam pelaksanaan implementasi program JKN ini.

Struktur birokrasi tidak lepas dari kemampuan manajerial para pelaku birokrasi. Oleh karena itu ilmu dasar-dasar manajemen sangat bersinergi dengan struktur birokrasi yang berjalan. Struktur birokrasi mengandung banyak hal tentang organisasi, salah satunya adalah fungsi pengorganisasian, dari fungsi pengorganisasian muncullah suatu organisasi, yang memperlihatkan arus interaksi dalam organisasi itu siapa yang memerintah, siapa yang menjawab, dan siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan. Dari fungsi tersebut, akan terbentuk sebuah organisasi birokrasi yang terstruktur dengan baik pula. Struktur birokrasi yang dibuat untuk pelaksanaan program ini dapat dikatakan masih lemah sehingga untuk melaksanakan program JKN mengalami kendala dalam hal sosialisasi. Kebijakan ini mengandalkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program ini, misalnya udah mau melahirkan atau sudah sakit baru mendaftarkan.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang sosialisasi dan implementasi program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten

Sambas yang telah peneliti jabarkan diatas, setelah peneliti analisis dengan menggunakan teori yang ada, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan hanya di satu tempat yaitu kantor camat Sejangkung, dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi program JKN non PBI (mandiri) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kecamatan Sejangkung dapat dikatakan kurang efektif, karena variabel sumber daya yang mempengaruhi program ini kurang memadai, terutama sumber daya tenaga dan keuangan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakter ataupun watak yang dimiliki oleh implementor yaitu BPJS Kabupaten Sambas. Analisis mengenai faktor sikap pelaksana atau disposisi BPJS Kabupaten Sambas tentang Program JKN di Kecamatan Sejangkung, peneliti belum bisa menganalisis lebih mendalam, hal ini kurangnya keterbukaan pihak BPJS Kabupaten Sambas dalam memberikan

informasi pada saat wawancara mengenai disposisi.

4. Struktur Birokrasi

BPJS Kabupaten Sambas dalam pembagian tugas telah harus sesuai dengan prosedur, dengan demikian akan terjalin hubungan antar implementor, dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para implementor dalam pelaksanaan implementasi program JKN ini.

F. SARAN

1. Perlunya peninjauan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Melalui Pemerintah Kabupaten Sambas, peninjauan langsung harus dilakukan melalui instansi terkait yaitu BPJS Kabupaten Sambas. Peninjauan dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Sambas mengetahui kendala yang dihadapi BPJS Kabupaten Sambas dalam melaksanakan program ini terutama dalam penganggaran untuk sosialisasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat dalam hal

meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya untuk mengikuti Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

3. Meningkatkan kualitas komunikasi dalam pengajuan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar BPJS Kabupaten Sambas mengajukan dan menyusun anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan program, agar program dapat berjalan tanpa hambatan dan bersinergi dengan baik antara BPJS pusat dengan BPJS di daerah.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti masih merasa kurang terampil dalam merangkai kalimat sehingga peneliti mengalami kesulitan menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan. Selain itu kurangnya pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, kelemahan tersebut khususnya pada saat wawancara.
2. Subjek dalam penelitian khususnya BPJS Kabupaten Sambas tidak terbuka secara detail dalam menyampaikan informasi, sehingga peneliti setidaknya

hanya mengetahui 70% informasi yang berkaitan dengan pengimplementasian Program Jaminan Kesehatan Nasional.

H. REFERENSI

Buku :

Agustino, Leo, 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Aman.

AR, Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation

Bonar, S.K. 1983. *Hubungan Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.

Koeswandoyo dan Shodiq, Musthofa. 1995. *Sosiologi I. Pabean* : Surakarta.

Islamy M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Isworo, W.I., 1996. *Beberapa Pendekatan dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Mazmanian, D.A. dan Sabatier, P.A.. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA, London : Scott Foresman and Company.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Muslimin, 2004. *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian*. UMM Pers: Malang.

Satori dan Komariah Aan, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----- 2006 . *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2007. *Memahmi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

----- . 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Suprpto, Tommy dan Fahrianoor, 2004. *Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Arti Bumi dan Intara.

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006, 2012 *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

-----, 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

-----, 2002. *Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prsessindo.

Skripsi :

Cahyani, Riris Br Sitorus, 2014. *(Skripsi) Sosialisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Oleh Bidang Perijinan Jasa Usaha Di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Jurnal :

Syariffudin. 2000. *(Jurnal) Efektivitas IMB sebagai salah satu instrumen dalam penataan ruang kota di Kota Bangkinang*. Tesis S2 diajukan kepada Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

Rujukan elektronik :

Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Diambil pada Tanggal 29 Desember 2015 dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/bpjs.htm>.
[www. Panduanbpjs.com](http://www.Panduanbpjs.com)

Lain-lain :

Disdukcapil Kabupaten Sambas Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester I tahun 2015.

Buku Pedoman BPJS.

Buku Profil Kecamatan Sejangkung 2015.
Pemerintah Kabupaten Sambas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Heri Hasan Hariri
 NIM / Periode lulus : E01112048 / Periode Satu (1)
 Tanggal Lulus : 1 Agustus 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : hasanheri@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. H. Hadari M. AB
 NIP. 19720905/2002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 18 Agustus 2016

 Heri Hasan Hariri
 NIM. E01112048

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)